

## Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun

Iskandar Sam<sup>1</sup>, Misni Erwati<sup>2</sup>, Muhammad Febriansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : [muhammadfebriansyahc1c019024@gmail.com](mailto:muhammadfebriansyahc1c019024@gmail.com)

**Abstract.** This research aims to analyze the regional financial accounting system at the Sarolangun district regional financial and asset management agency office. This research lasted for 3 months. This research is qualitative research, while the data sources used in this research consist of secondary data sourced from information at the research site, scientific journals and books related to the research object and primary data obtained directly from respondents or those who are sample in this study. Data analysis in this research used the Miles & Huberman Interactive analysis technique. The results of this research show that in carrying out the main tasks and functions in the field of effective, accurate and transparent regional financial management, the Regional Financial & Asset Management Agency uses the SIMDA Finance Application and Microsoft Excel which helps manage regional government financial data. The implementation of the regional financial accounting system at BPKAD Sarolangun Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems Articles 2 and 20. Preparation of BPKAD Sarolangun Regency Financial Reports consisting of: 1) Budget Realization Report, 2) Operational Report 3) Balance Sheet, 4) Equity Change Report 5) Cash Flow Report and 6) Notes to Financial Reports where the format and description of estimates have been classified in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (PSAP 01) and Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 Concerning the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Regional Governments.

**Keywords:** Regional Financial Accounting System, BPKAD

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sarolangun. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang bersumber dari informasi ditempat penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan buku buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan data primer yang di peroleh secara langsung dari responden atau yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok di bidang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akurat, dan transparan Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Microsoft Excel yang membantu pengelolaan data keuangan pemerintah daerah. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pasal 2 dan 20. Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional 3) Neraca, 4) Laporan Perubahan Ekuitas 5) Laporan Arus Kas dan 6) Catatan Atas Laporan Keuangan dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 01) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci:** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, BPKAD

### LATAR BELAKANG

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena: (1) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (2) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan (3) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Halim, 2012).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah dapat dipahami, dan bisa memnuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas, dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Ikyarti & Aprila, 2019).

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah (Suharsono, 2019).

## **LANDASAN TEORI**

### **Sistem Akuntansi Keuangan**

Mulyadi (2010) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem padadasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungan satu sama lain dan berfungsi sama-sama untuk mencapai hubungan tertentu.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan diluar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna.

### **Akuntansi Keuangan Daerah**

Mahmudi (2011), mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. (Siyoto dan Sodik, 2015) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu masalah. Metode tersebut adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk itu peneliti akan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yang menggambarkan penerapan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Peneliti ingin mengkaji data-data faktual tentang gambaran proses implementasi prinsip Sistem Akuntansi pada pemerintahan Daerah kemudian mendeskripsikan dalam bentuk tulisan. Penulis berusaha untuk mengambil data dalam suasana yang wajar dan tanpa manipulasi/merekayasa sesuai situasi sehingga data yang diperoleh akan memenuhi validasi data yang diperlukan. Upaya untuk memperoleh data yang valid dilakukan dengan menggali informasi setuntas mungkin dan mengambil data sesuai fokus kajian.

Pelaporan data disusun dalam bentuk deskriptif setelah peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapatkan. Penggalan informasi secara mendalam, menyeluruh, dan lengkap dari masing-masing subjek penelitian akan memberikan hasil penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif didasari oleh pemikiran bahwa pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian. Pengguna metode penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam tentang analisis sistem akuntansi keuangan sektor pada pemerintahan Kabupaten Sarolangun.

### **Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pemerintah daerah (Kantor Bupati Sarolangun). Dalam hal ini, peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai analisis sistem akuntansi keuangan dipemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun dijalan Kantor bupati Sarolangun

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar dan bukan berupa angka atau hitung-hitungan. Data dikumpulkan jika arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Semiawan, 2010). Data Kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan secara tertulis maupun lisan khususnya dalam implementasi *Sistem Akuntansi* pada pemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada BPKAD Kabupaten Sarolangun**

Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan SAP berbasis akrual PP nomor 71 tahun 2010 yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengembalian amanat pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPKAD Kabupaten Sarolangun sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA) sejak 2015 hingga sekarang akan tetapi masih tetap juga menggunakan sistem manual atau penyusunannya menggunakan Microsoft Excel. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbid Pelaporan DAK dan Dana Tugas Pembantu BPKAD, yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun menggunakan aplikasi SIMDA tetapi untuk hasilnya masih menggunakan Microsoft Excel atau manual hanya penginputan dan proses pencairan yang menggunakan aplikasi SIMDA”.

Hal ini telah sesuai dengan penerapan SIMDA keuangan umum menurut BPKP yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Yang menyebabkan pengelolaan keuangan di BPKAD masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan SIMDA secara keseluruhan disebabkan beberapa hal. Hal ini diungkapkan oleh Kasubbid Pelaporan DAK dan Dana Tugas Pembantu BPKAD yang mengatakan bahwa:

“Ketika penyusunan laporan keuangan aplikasi SIMDA yang digunakan tidak bisa dipakai dikarenakan database komputer error jadi agar ada laporan keuangannya dialihkan ke manual”.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Sarolangun didalam menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal ini tersirat dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau berbicara kendala sebenarnya bukan hanya dari teknologinya yaitu database tapi ada juga dari Sumber Daya Manusianya, jangankan hanya di BPKAD Kabupaten Sarolangun untuk di setiap SKPD nya SDM itu yang kurang dalam memahami sistem yang ada yaitu SIMDA keuangan”.

Sarana yang diperlukan dalam penggunaan SIMDA tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA, dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA di instal kan ke dalam komputer sesuai petunjuk pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah di instal komputer harus dikoneksikan ke server lewat jaringan internet.

Faktor dukungan infrastruktur dan kesiapan SDM dalam penerapan SAKD diungkapkan dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara infrastruktur sebenarnya jaringan yang terutama, jaringan yang kurang memadai terus kantor juga tidak kondusif / tidak memadai, terus kesiapan SDM nya ini kurang karena sedikitnya pelatihan dari PEMDA nya sendiri terus kalau berbicara SDM di Kab. Sarolangun itu rata-rata SDM nya bukan PNS tapi kebanyakan itu yang menjalankan aplikasi itu honorer atau tenaga kontrak”.

Dalam lembaga pemerintah daerah sumber daya manusia harus mendapat manajemen pengolahan yang baik melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan sehingga nantinya akan

dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlebih lagi adanya problem antara dasar pendidikan Teknologi Informasi dengan dasar pendidikan Akuntansi. Seorang operator dengan pendidikan Teknologi Informasi mungkin dapat sangat memahami SIMDA namun kurang paham dalam segi akuntansi. Sementara itu, seorang operator dengan latar akuntansi dapat bermasalah dengan Teknologi Informasi. Karena tidak bertopang pada latar belakang pendidikan formal, maka kompetensi dari SDM SIMDA harus selalu melakukan Pelatihan. Pelatihan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dengan berkoordinasi BPKP sebagai pemegang hak cipta dari SIMDA.

Dengan penerapan SIMDA sebagai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Hal ini disampaikan dalam wawancara yang mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya kalau berbicara kualitas aplikasi itu memang menyediakan informasi yang lengkap cuman di akhirnya saja untuk di bagian penyusunan laporan keuangan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan. Kalau berbicara aplikasi itu sebenarnya itu prosesnya hanya untuk memudahkan dalam penginputan pelaporan pertanggungjawabannya laporan realisasi, penginputan BKU, penginputan SP2D, proses-proses pencairan, dan pelaporan, untuk laporan Belanja menggunakan sistem akuntansi akrual digunakan saat transaksi terjadi langsung di catat, sedangkan sistem akuntansi manual berbentuk kas untuk pendapatan. Yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual BPKAD Kabupaten Sarolangun yaitu PA, PPTK, KPA, Bendahara. Pencatatan dilakukan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan seperti SPJ dilakukan oleh PPTK dan pembukuan dilakukan oleh Bendahara”.

Walaupun banyaknya keterbatasan yang dimiliki dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

### **Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Sarolangun**

Implementasi Sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sarolangun, dilakukan wawancara dengan Kasubbid Pelaporan DAK dan Dana Tugas Pembantu BPKAD didapat hasil:

“Sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ruang Lingkup SPID meliputi:

1. Informasi Pembangunan Daerah
2. Informasi Keuangan Daerah
3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, BAB IV, Bagian Ketiga tentang Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pasal 20 memuat:

1. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.
2. Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a Laporan realisasi anggaran
  - b Laporan perubahan saldo anggaran lebih
  - c Laporan operasional
  - d Laporan perubahan ekuitas
  - e Neraca
  - f Laporan arus kas
  - g Catatan atas laporan keuangan.

#### **Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Sarolangun**

Laporan keuangan BPKAD Kabupaten Sarolangun 2021-2022 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Berdasarkan data penelitian LRA 2022 BPKAD Kabupaten Sarolangun menyajikan pos laporan keuangan sebagai berikut:

##### **A. Pendapatan LRA**

###### **Pendapatan Asli Daerah**

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

###### **Pendapatan Transfer**

- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
- Transfer Pemerintah Provinsi

###### **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan LRA tahun 2022 mengalami kenaikan 1,05% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 55.284.175.679,48.

B. Belanja

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah

Belanja Modal

- Belanja Tanah
- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Bangunan dan Gedung
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Belanja Aset Tetap Lainnya
- Belanja Aset Lainnya

Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja tahun 2022 mengalami kenaikan 1,10% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 83.980.615.96,51.

C. Transfer

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer tahun 2022 mengalami kenaikan 1% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 721.493.521.

D. Surplus/Defisit

Penerimaan Pembiayaan

- Penggunaan SiLPA
- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Realisasi Surplus/Defisit tahun 2022 mengalami penurunan 2,38% dari tahun 2021 atau lebih kecil Rp 29.417.933.802,03.

E. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2022 mengalami kenaikan 1,81% dari tahun 2021

atau lebih besar Rp 45.699.585.735,83.

### **Laporan Operasional (LO)**

#### **A. Pendapatan**

##### Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

##### Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
- Transfer Pemerintah Provinsi

##### Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Laporan Operasional tahun 2022 mengalami kenaikan 5,98% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 69.325.105.980,28.

#### **B. Beban**

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Transfer
- Beban Lain-lain

Realisasi Beban Laporan Operasional tahun 2022 mengalami kenaikan 9,97% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 110.126.178.581,05.

C. Surplus/Defisit dari Operasi

Realisasi Surplus/Defisit Operasi tahun 2022 mengalami penurunan 74,72% dari tahun 2021 atau lebih kecil Rp 40.801.072.600,77.

D. Pos Luar Biasa

- Beban Luar Biasa

Pos Luar Biasa Laporan Operasional tahun 2022 mengalami kenaikan 889,79% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 4.915.608.349,10.

Realisasi Laporan Operasional tahun 2022 mengalami penurunan 84,58% dari tahun 2021 atau lebih kecil Rp 45.716.680.949,87.

**Neraca**

A. Aset

- Aset Lancar
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Realisasi Jumlah Aset tahun 2022 mengalami penurunan 1,11% dari tahun 2021 atau lebih kecil Rp 245.694.826.304,69.

B. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Belanja
- Utang Jangka Pendek Lainnya

Realisasi Kewajiban Jangka Pendek tahun 2022 mengalami penurunan 9,99% dari tahun 2021 atau lebih kecil Rp 29.742.160.989,47.

C. Ekuitas

Relalisasi Ekuitas tahun 2022 mengalami penurunan 1,09% dari tahun 2021 atau lebih kecil Rp 215.952.665.315,22.

**Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

1. Ekuitas Awal

Realisasi Ekuitas Awal tahun 2022 mengalami kenaikan 65,29% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 2.465.903.374.686,56.

2. Surplus/Defisit-LO

Realisasi Surplus/Defisit-LO tahun 2022 mengalami penurunan 6,48% dari tahun 2021

atau lebih kecil Rp 45.716.680.949,87.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar  
Koreksi Ekuitas tahun 2022 mengalami kenaikan 100% dari tahun 2021 yaitu Rp 250.770.071.467,28.
4. Ekuitas Akhir  
Realisasi Ekuitas Akhir tahun 2022 mengalami kenaikan 24,48% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 2.169.416.622.269,41.

#### **Laporan Arus Kas (LAK)**

##### **A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

###### Arus Kas Masuk

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Pendapatan Transfer Antar Daerah
- Pendapatan Hibah
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

###### Arus Kas Keluar

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 mengalami penurunan 1,02% dari tahun 2021 atau lebih kecil sebesar Rp 3.266.840.348,78

##### **B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

###### Arus Kas Masuk

- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

###### Arus Kas Keluar

- Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Penyertaan Modal Daerah

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2022 mengalami kenaikan 1,17% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 27.648.093.453,25

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk

- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2022 mengalami kenaikan 37,29% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 6.349.998.

D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk

- Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus Kas Keluar

- Koreksi siLPA
- Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 mengalami kenaikan 2,10% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 37.651.103,81.

E. Saldo Awal Kas

Saldo awal kas tahun 2022 mengalami kenaikan 1,79% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 47.224.482.884,02.

F. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas tahun 2022 mengalami kenaikan 1,15% dari tahun 2021 atau lebih besar Rp 16.281.651.933,80.

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan data penelitian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 memuat penjelasan dan catatan atas laporan keuangan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.2.1 Pendapatan LRA

4.2.2 Belanja

3.2 Neraca

3.2.1 Aset

3.2.2 Kewajiban

3.2.3 Ekuitas

3.3 Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan LO

3.3.2 Beban

3.3.3 Surplus

3.4 Laporan Arus Kas

3.4.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

3.4.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

3.4.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

3.4.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

3.4.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

3.4.6 Saldo Awal Kas

3.4.7 Saldo Akhir Kas

3.5 Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1 Ekuitas Awal

3.4.2 Surplus/Defisit-LO

3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir

BAB IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

## BAB V Penutup

Berdasarkan Item-item Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD menurut PSAP 01 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 sudah memenuhi kelengkapan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok di bidang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akurat, dan transparan Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Microsoft Excel yang membantu pengelolaan data keuangan pemerintah daerah. Penerapan SIMDA Keuangan sebagai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun saat ini belum begitu efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur berupa jaringan dan fasilitas yang memadai dan masalah kesiapan Sumber Daya Manusia. Walaupun SIMDA Keuangan belum efektif diterapkan akan tetapi penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
2. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pasal 2 dan 20.
3. Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional 3) Neraca, 4) Laporan Perubahan Ekuitas 5) Laporan Arus Kas dan 6) Catatan Atas Laporan Keuangan dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 01) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengacu pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun

menyempurnakan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Sarolangun. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Berfokus pada peningkatan kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan cara memberikan fasilitas yang memadai dan sosialisasi pelatihan secara berkala, kemudian pada saat proses pengoperasian harus berkelanjutan agar pengalaman & data tetap terjaga dengan baik, serta menambah jumlah SDM terutama yang mempunyai basic pengetahuan komputer serta yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berjalan optimal.
2. Untuk penelitian berikutnya, dapat ditambahkan indikator baru untuk memperkaya model yang digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian hasil penelitian berikutnya dapat lebih sempurna dan kesimpulan yang diperoleh dapat berubah lebih baik atau tetap sama

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. 2019. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi* ISSN, 9(2), 2019.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. UUI Press, Yogyakarta.
- Suharsono, L. 2019. Pengaruh Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat). Universitas Widyatama, Bandung.